



PENOMENA PERKAWINAN *PAMELIN LUH* DALAM PEMBENTUKAN PENDIDIKAN KARAKTER UMAT HINDU DI DESA BEBETIN BULELENG

Oleh :

I Nyoman Temon Astawa¹, Ni Komang Sudarningsih², I Made Rajendra³

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
temonastawa@gmail.com

Diterima 11 Agustus 2020, direvisi 8 September 2020, diterbitkan September 2020

Abstract

Character education in the family is strongly influenced by the family's existence of the child. A happy family can be determined from the initial formation of the family. The formation of a family certainly starts from the marriage process. One form of marriage that is carried out is the tradition of pamel luh marriage. According to the Pamelin marriage ceremony in Pakraman Bebetin Village, this social function was clearly visible from the beginning of the marriage plan. In marriages that are carried out by memadik (ngidih, propose), then there is contact and communication that has been done when the male family conveys the intention of his arrival will propose to the daughter of the woman. Social interactions between the male family and the female family have occurred during the work (mekruna). If there is certainty and agreement on a good day in the implementation of the marriage ceremony then in this connection the more visible sense of togetherness in social life in the form of mutual cooperation in the banjar pakraman or Bebetin community. The sense of solitude of the Bebetin Village community is quite high. This can be seen if there are members of the community (banjar) who will carry out a ceremony or yajña both in a state of joy and sorrow without being invited as long as they hear it must come and help in the form of material and energy.

Keywords: *Penomena, Marriage.*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yaitu suatu proses yang mampu membentuk keadaan kehidupan manusia yang sesuai dengan kehidupannya, melakukan kebiasaan yang sesuai dan mengerti dengan situasi lingkungan sekitarnya. Menurut Undang-undang yang mengatur tentang Sistem pendidikan, pendidikan memiliki fungsi dan tujuan yang tentunya sesuai dengan peradaban bangsa serta terbentuknya kondisi bangsa yang bermartabat, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mendapatkan maksud tersebut tidak terlepas dari fungsi serta kedua orang tua dan masyarakat. Keluarga merupakan bagian dari struktur sosial setiap masyarakat adalah salah satu unsur sosial yang paling awal mendapat dampak dari setiap perubahan sosial budaya. Pendidikan secara umum bertujuan untuk membentuk insan-insan sebagai sumber daya insani yang mengerti serta mampu dan mempunyai daya tahan, namun sering kali menunjukkan keadaan yang sangat idealitis dan mempunyai tujuan yang sering menyimpang sehingga kurang sesuai dengan hal-hal yang ada bagi kebutuhan masyarakat. “Pendidikan nasional berfungsi



mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab” (Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3). Oleh karena itu diperlukan sumber daya yang mumpuni, mengerti, tangguh, handal, cerdas, berwatak kompetitif dalam melaksanakan kehidupan di masyarakat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu sifat dari kelahiran, keadaan sekitar, dan keuletan dalam berlatih. Peranan pendidikan tentunya mampu menciptakan suasana yang terkondisikan dan memberikan latihan-latihan yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan kehidupan. Dengan demikian dibutuhkan suatu pembelajaran yang kreatif untuk menghasilkan manusia yang kreatif, memiliki ketrampilan, dan berkarakter.

Pendidikan karakter tidak bisa lepas dari peranan keluarga sebagai tempat menempa ilmu yang pertama dan utama. Dalam agama Hindu keluarga menjadi tempat yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Karakter anak menjadi bagus tentunya didukung oleh keberadaan keluarga yang baik pula. Pembentukan keluarga tentunya dimulai dari proses pembentukan awal keluarga yang diawali dengan proses perkawinan. Perkawinan dalam agama Hindu tidak bisa lepas dengan yang anama unsur upacara yang mendukung proses uparaca perkawinan itu.

Pelaksanaan upacara dalam ajaran Agama Hindu tidak dapat diabaikan oleh umatnya, sebagaimana ditegaskan bahwa Hindu dalam kesehariannya yang dilakukan meliputi tiga unsur utama yang saling kait mengkait tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang sangat penting

antara kompon dengan komponen yang lainnya yaitu berupa ajaran *tattwa*, *susila* dan *upacara* (Tim, 1985: 5).

Salah satu bentuk upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu adalah upacara pawaiwahan; upacara pawaiwahan ini merupakan bagian dari upacara manusa yadnya yang wajib dilakukan oleh umat Hindu apabila melakukan pernikahan (perkawinan). Menurut pandangan Hindu, pawaiwahan adalah merupakan dharma suci (*sakraman*, *samaskara*) adalah bentuk suatu pertalian dua pihak (purusa dan predana) yang mengikatkan dirinya dalam suatu pawaiwahan dengan tujuan untuk membentuk ikatan yang sejahtera dalam suatu ikatan keluarga baik lahir maupun bathin.

Upacara pawaiwahan adalah awal terbentuknya kehidupan berumah tangga yang disebut dengan *grehasta asrama*. *Grehasta asrama* merupakan bagian dari *catur asrama*, yang terdiri dari *brahmacari*, *grhasta*, *wanaprasta*, dan *bhiksuka* (Punyatmadja, 2000: 10).

Pawaiwahan itu sebagai suatu hal yang sangat dimuliakan dalam kehidupan beragama Hindu, karena pawaiwahan itu dilihat sebagai suatu cara dalam melepaskan derita orang tuanya pada waktu mereka telah meninggal. Perkawinan itu dipandang juga sebagai suatu *dharma*. Pengertian *dharma* ini juga dibenarkan dalam pawaiwahan, karena pawaiwahan itu diabadikan berdasarkan kitab suci *Veda* dan merupakan salah satu bentuk kegiatan berupa penyucian diri melalui upacara pawaiwahan (Pudja, 2000: 49).

Undang-Undang perkawinan yang belaku di Republik Indonesia memandang tentang pawaiwahan, bahwa perkawinan/pawaiwahan dianggap sah apabila telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan salah satu pasal dalam UUD 1945 yaitu pasal 29 yang memberi kesesuaian bagi warga negaranya untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Berkenaan



dengan hal tersebut, ada jaminan kebebasan bagi setiap orang untuk menentukan pasangan hidupnya sampai pada jenjang perkawinan, tanpa ada halangan untuk melaksanakan perkawinan tersebut asalkan dilandasi oleh rasa cinta dan rasa kasih sayang dengan pasangan.

Walaupun dalam pelaksanaan upacara perkawinan sudah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, yang menjadikan agama sebagai landasan, pegangan dan pedoman dalam melaksanakan perkawinan sehingga dapat dikatakan perkawinan itu telah sah, tetapi pandangan ajaran Agama Hindu perkawinan itu merupakan tahap awal dalam memasuki jenjang kehidupan *grehasta asrama*, dan adanya rasa cinta kasih adalah faktor mutlak sebagai landasan dalam memasuki *grehasta asrama*. Landasan cinta kasih inipun juga tampak dari rumusan Pasal 1 UU RI Nomor 1/ 1974, disebutkan antara lain perkawinan/pawiwahan adalah ikatan yang terjadi dalam hal ini lahir bathin antara seorang purusa dengan seorang pradana dalam istilah Hindu yang nantinya sebagai *pakurenan* untuk menjadikan istana keluarga atau rumah tangga yang aman lestari berdasarkan Ida Sanghyang Widhi wasa dalam istilah agama Hindu yang berarti Tuhan Yang Maha Esa.

Telah cukup banyak ilmuwan yang menulis tentang perkawinan, karena perkawinan adalah soal yang menarik terutama dalam ilmu sosiologi dan paling banyak diselidiki. Seorang sosiolog akan menyebutkan bahwa perkawinan adalah merupakan lembaga sosial. Sebagai lembaga sosial, perkawinan mulai dari persiapan sampai mencapai tahap pelaksanaan, oleh masyarakat secara tidak tertulis seakan dituntut untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial yang lazim berlaku.

Penyelenggaraan pawiwahan sangat erat kaitannya dengan adat dan agama/kepercayaan yang dianutnya dan bahkan sangat sulit untuk membedakan antara

adanya unsur adat, agama dan budaya yang menyertai penyelenggaraan perkawinan. Tetapi suatu perbedaan yang tampak dari kedua unsur itu adalah bahwa dalam perwujudan adat itu tergantung kepada *desa, kala, patra*. Sedangkan agama mempunyai sifat umum universal dan abadi sehingga tidak ada perbedaan. Telah dimaklumi bersama bahwa kebudayaan Bali dijiwai oleh ajaran agama Hindu, yang sampai kini tetap hidup, tumbuh, berkembang dan tetap *ajeg* di tengah-tengah arus globalisasi serta perkembangan dunia dan teknologi yang amat cepat. Berkembang pesatnya arus globalisasi juga akan sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya suatu masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Adanya pengaruh terutama pengaruh negatif dari budaya asing sampai saat ini dapat difilterisasi oleh nilai-nilai adat dan agama Hindu yang tetap dapat eksis dalam kehidupan masyarakat Hindu khususnya di Bali. Keadaan seperti ini dapat terwujud berkat ketaatan dan kepatuhan masyarakat Bali terhadap adat-istiadat, agama maupun tradisi..

Untuk sahnya ikatan lahir bathin antar seorang purusa dengan pradana dalam suatu pawiwahan maka Undang-Undang Perkawinan juga telah menetapkan bahwa suatu perkawinan/pawiwahan tersebut baik jika telah dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa untuk sahnya harus dilakukan suatu upacara sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut. Upacara perkawinan mengandung nilai-nilai sakral baik secara lahiriah maupun spiritual. Pelaksanaan upacara tersebut adalah untuk penyucian mempelai berdua maupun untuk pengesahan hubungan suami istri agar nantinya dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan dapat melahirkan anak yang *suputra*, sehingga dapat berguna bukan saja bagi pekurenan itu tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dan Negara yang berkonsentrasi lebih luas.



Pelaksanaan upacara perkawinan sebagaimana telah dikemukakan di atas dilaksanakan sesuai dengan adat, agama atau kepercayaannya. Berdasarkan hal itu pelaksanaan upacara perkawinan tidak akan terlepas dari pengaruh budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; yang semuanya akan memberikan sifat, corak dan ciri khas tersendiri. Bagi Agama Hindu hal ini bukan menjadi persoalan oleh karena dalam Agama Hindu dikenal konsep *desa, kala, patra*, namun semuanya itu mempunyai tujuan yang sama yaitu adanya makna penyucian terhadap pasangan atau mempelai.

Pengaruh budaya dan adat istiadat setempat sangat tampak dalam suatu upacara perkawinan yang dilaksanakan dimana penulis melakukan penelitian yaitu di Desa *Pakraman* Bebetin. Desa Bebetin termasuk dalam wilayah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, yang termasuk bilangan desa tua, dimana penduduknya masih bersifat homogen dalam arti semua penduduknya adalah beragama Hindu, dan juga tidak ada golongan yang disebut *Tri Wangsa*. Di Desa Bebetin ada yang unik dalam pelaksanaan upacara perkawinan, yaitu suatu tata cara atau kebiasaan yang telah diterima dari pewaris-pewaris terdahulu yang masih tetap berlangsung dan dipelihara dan dipertahankan sampai sekarang, yaitu adanya suatu pemberian yang biasanya dalam bentuk sejumlah sarana prasarana atau berbentuk uang dengan jumlah tertentu yang diberikan oleh pihak purusa kepada pihak predana pada saat upacara pawaihangan dilangsungkan. Pemberian pada saat upacara perkawinan ini dilangsungkan yang di Desa Bebetin disebut dengan "*pamelin luh*" dan berlangsung sampai saat ini.

Upacara penyerahan *pamelin luh* sebagaimana pula dalam bentuk atau jenis perkawinan lainnya dipergunakan berbagai macam sarana upacara. Sarana yang dimaksud antara lain dengan berbagai jenis *banten, tirtha, api* atau *dhupa, kewangen, cecepan,*

penastan, tetabuhan (arak, berem, jinah bolong (uang kepeng), base tampin dan sebagainya. Di Desa *Pakraman* Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, nampak tradisi perkawinannya berbeda dengan tempat-tempat lainnya, disamping sarana upacara yang dipergunakan sebagaimana tersebut di atas yaitu penyerahan sejumlah materi dalam bentuk uang oleh pihak atau mempelai purusa pada mempelai predana pada saat upacara dilaksanakan disebut dengan *pamelin luh*. Pelaksanaan upacara perkawinan belum dianggap lengkap apabila belum diserahkannya *pamelin luh* oleh pihak laki-laki pada saat upacara. Pembentukan karakter anak sebagai bagian dari keluarga itu tentunya dimulai dari pelaksanaan upacara perkawinan tersebut.

II. PEMBAHASAN

Pendidikan dalam lingkup *pekurenen* atau keluarga adalah pendidikan yang sangat penting serta yang pokok dan pertama bagi *suputra*, yang tidak bisa dialihkan oleh pihak lembaga manapun. Keluarga yang baik serta harmonis, selalu rukun serta dalam keadaan damai, akan tercermin dari kondisi alamiah dan karakter anaknya. Pendidikan dalam keluarga sangat diperlukan untuk membangun sebuah *community of learner* tentang pendidikan anak, serta sangat diperlukan menjadi sebuah kebijakan pendidikan dalam upaya membangun karakter bangsa berkelanjutan. Harus dipahami kondisi dan tata cara belajar anak. Semakin maju dan modern perkembangan pikiran anak, akan menjadikannya semakin tertantang untuk berusaha belajar dan mencari pengalaman baru (Nugraha, 2005:4). Hal ini akan menyebabkan sikap dan perilaku seseorang sebagai faktor penyebab perubahan pada perilaku dan sikap anak. Menurut Latifah (2008) dalam Wibowo (2012:106) keluarga merupakan tempat yang paling pertama dan utama. Oleh karena itu, sudah semestinya setiap keluarga memiliki kesadaran bahwa



karakter bangsa ini sangat tergantung pada pendidikan karakter anak dikeluarga masing-masing.

Seseorang akan belajar secara alami dan perlahan dari orang yang sering berhubungan dengannya. Sebaiknya tidak usah memaksakan kehendak kepada orang itu. Lihatlah anak dari sudut anak, bukan dari sudut kita semata. Anak sama halnya dengan orang dewasa, ia tidak akan berkembang secara leluasa jika berada di bawah tekanan atau pengaruh pihak lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan/pawiwahan dalam pasal 2 ayat (1) dengan tegas dinyatakan bahwa :”*pawiwahan* atau perkawinan adalah sesuai dengan adat budaya dan tradisi masyarakat apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Dengan demikian bagi umat Hindu perkawinan harus disahkan menurut ketentuan hukum dan Agama Hindu. Tatacara pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Indonesia tidaklah seragam, karena sangat diwarnai oleh budaya setempat. Demikian pula tatacara pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Bali juga bervariasi yaitu sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi masyarakat yang melakukan upacara pawiwahan tersebut.

Putra (2006: 45), dikatakan bahwa sesungguhnya masih ada upacara yang disebut *ngaba jaja* atau *mepejati*. Kiranya upacara ini lebih banyak bersifat spiritual/*niskala* yaitu merupakan penegasan status, pelepasan hak serta kewajiban dari salah satu mempelai dan pernyataan terimakasih dari pihak mempelai laki kepada pihak mempelai perempuan. Oleh sebab itu sering juga disebut upacara *mepamit*. Pelaksananya sering tertunda sampai jangka waktu yang lama, terutama dalam perkawinan yang tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Dalam upacara ini tidak ada *sesajen/upakara* yang khusus kecuali berupa *daksina/suci pejati*, beserta *reruntutannya*,

dilengkapi dengan jajan, buah-buahan, pakaian untuk kedua orang tua serta saudara-saudaranya sesuai dengan kemampuan pihak mempelai yang mengambil. Secara umum upacaranya disebut “*jauman*” atau *pemelin yeh nyonyo*” (pembeli air susu). Dengan adanya upacara ini maka tidak hanya perkawinan kedua mempelai dianggap sah tetapi juga status atau kedudukannya, sehingga hari tuanya akan terjamin (Putra, 2006: 45).

Windia (2009: 56) mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat Bali dianggap sah apabila berjalan sesuai hukum adat Bali dan Agama Hindu yang teraktualisasikan dalam *tri upasaksi* (tiga kesaksian), yang terdiri dari (1) *bhuta saksi* (bersaksi kepada *bhuta kala* dengan menggunakan sarana *upakara* atau *banten* (sesajen) yang dikenal dengan *banten byakala* atau *banten byakaonan*; (2) *manusa saksi* (disaksikan oleh keluarga dan *krama* (warga) *desa pakraman*, yang ditandai dengan kehadiran *prajuru desa* (prangkat pimpinan *desa pakraman*) atau *prajuru banjar* (prangkat pimpinan *banjar pakraman*), dan ditandai pula dengan adanya *suaran kulkul* (bunyi kentongan desa atau kentongan banjar); (3) *dewa saksi* (bersaksi kepada *Ida Sanghyang Widhi Wasa*, dengan menggunakan sarana upacara yang dikenal dengan *banten tataban*. Dengan demikian perkawinan tersebut dianggap sah walaupun tanpa dihadiri perangkat desa dinas, tanpa pencatatan perkawinan dan belum memiliki akte perkawinan.

Kenyataan dalam pelaksanaan pawiwahan bagi umat Hindu di Bali akan dilakukan dalam kurun waktu yang berbesa-beda, penyelesaiannya pada hari yang berbeda, atau mungkin baru diselesaikan sampai beberapa bulan atau bahkan upacara pawiwahannya baru diselesaikan setelah melahirkan atau mempunyai anak. Dalam hal ini melahirkan suatu masalah dalam kehidupan bermasyarakat berupa



ketidaksesuaian dengan awig-awig yang berlaku untuk menetapkan moment yang tepat yang menjadi unsur sahnya pawiwahan itu. Tidak mungkin meletakkan unsur sahnya pawiwahan pada selesainya upacara *mepejati* tersebut, karena hal itu akan menimbulkan akibat hukum yang berantai, mulai dari status *sentana* yang *numadi* sebelum upacara *mepejati* tersebut sampai pada masalah harta *gono gini pawiwahan* dikemudian hari. Karena itu tepatlah yurisprudensi yang menyatakan bahwa *pewiwahan* itu sudah dianggap sesuai dan tepat sesudah kedua mempelai melakukan upacara *mabyakaon* (*mabyakala*).

Menyimak dari ketiga yurisprudensi tersebut di atas baik putusan pengadilan sebelum kemerdekaan dan setelah jaman kemerdekaan, telah dapat disimpulkan bahwa secara hukum suatu perkawinan bagi umat Hindu telah dianggap sah sesudah dilakukannya upacara *mebyakonon/mebyakala*. Sedangkan upacara selanjutnya yang disebut upacara *mepejati* atau *persaksian* adalah merupakan rangkaian dalam proses atau tahapan upacara perkawinan lebih lanjut berupa natab banten widhi widhana dan mejaya-jaya, sehingga melalui rangkaian upacara ini dianggap upacara perkawinan dianggap telah *puput* dan sah baik secara *sekala* maupun secara *niskala* dengan *tri upa saksi* itu.

Dalam *Awig-awig Desa Pakraman Bebetin* tidak ada dimuat tentang sahnya perkawinan akan tetapi hanya menentukan jalannya perkawinan yang dibenarkan (*sane patut*), sebagaimana ditentukan dalam *Pawos* 48 sebagai berikut:

Pawiwahan sane patut ring Desa Pakraman Bebetin manut Pawos 47 risampun:ha. Mawidi widana,na. kaupasakjsi antuk prajuru adat lan dinas, ca. kaunggahang ring sajeroning pailikitan tur katunasang ring sang ngawiwenang, ra. Upasaksi pawiwahan masrana daksina

ka. Matengeran suaran kulkul ring banjar (Pawos 47).

Dari ketentuan (*Pawos* 48) di atas dapat dicermati bahwa walaupun tidak ada menyebutkan tentang sahnya suatu perkawinan bagi warga *desa pakraman Bebetin*, akan tetapi bila pelaksanaan perkawinan telah dilakukan sebagaimana ketentuan *pawos* tersebut maka hal itu adalah pelaksanaan perkawinan yang dibenarkan menurut hukum adat dan Agama Hindu maupun *dresta* yang berlaku di *Desa Pakraman Bebetin*, sehingga dengan demikian berarti juga secara tersirat menentukan sahnya suatu perkawinan.

Dalam tradisi perkawinan *pamelin luh di Desa Pakraman Bebetin* bahwa dengan dilakukannya upacara *mebyakala/mebyakaonan* setibanya mempelai di rumah mempelai laki yang telah *dipuput oleh Jero Mangku*, walaupun tahapan upacara berikutnya belum dilakukan maka perkawinan itu sudah dianggap sah. Sedangkan penyerahan *pamelin luh* itu dilakukan pada saat *ngeraos ngidih/meminang* di rumah mempelai perempuan yang dipuja oleh *Jero Mangku* dan disaksikan oleh *prajuru adat* maupun kedinasan, adalah merupakan kelengkapan dan pemenuhan syarat dari perkawinan dengan *pamelin luh* yang sudah mentradisi dilakukan secara turun tumurun sehingga masyarakat *Desa Pakraman Bebetin* tidak berani melanggarnya. Adanya *pamelin luh* tersebut bukan menentukan sahnya perkawinan akan tetapi sebagai *syarat magis* yang harus dipenuhi oleh mempelai laki, sehingga dapat dikatakan hanya untuk menentukan sahnya perkawinan secara *niskala*, dan tidak melanggar tradisi yang telah ada dan berlangsung secara turun tumurun yang diyakini mengandung *makna magis*. Oleh karena apabila *pamelin luh* tersebut belum ada atau belum diserahkan kepada mempelai perempuan walaupun upacara perkawinannya telah dilaksanakan, maka akan dirasakan terutama oleh mempelai laki



masih berhutang secara *niskala* pada leluhur dari pihak mempelai perempuan, sehingga akan menjadi beban psikologis selama hidupnya.

Selama ini belum ada yang berani melanggar tradisi *pamelin luh* itu, belum ada pihak mempelai laki, baik yang berasal dari satu desa maupun dari luar *desa Pakraman Bebetin* yang tidak menyerahkan *pamelin luh* kepada orang tua mempelai perempuan, karena disamping takut akan adanya sanksi secara *niskala*, juga sudah diketahui ataupun sudah disampaikan oleh keluarga mempelai perempuan sebelum upacara *pemadikan* dilakukan dan bahkan juga pada saat mereka masih bertunangan, sehingga pada saat upacara dilaksanakan tidak ada permasalahan.

Para ahli sosiologi dan antropologi sejak dulu telah mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), yang berarti manusia hidup akan selalu mencari sesamanya, manusia tidak bisa hidup terasing atau menyendiri tanpa manusia lainnya. Naluri dari manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut *gregariousness* dan karena itu manusia juga disebut *social animal* (hewan sosial), yaitu hewan yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama), (Soekanto, 1982: 110). Sebagai makhluk sosial maka manusia tidak akan bisa hidup tersendiri tanpa bantuan orang lain sehingga sikap tolong menolong dan kesetiakawanan sangat dibutuhkan baik dalam keadaan susah maupun dalam kesenangan atau dalam keadaan suka ataupun duka.

Konsep kesetiakawanan sangat penting bahkan perlu ditumbuh kembangkan dalam berkehidupan antar sesama manusia.

Koentjaraningrat (2002: 62), konsep kesetiakawanan mencerminkan sistem nilai budaya Indonesia, yakni pertama: manusia tidak dapat hidup dalam ketersendirian namun dikelilingi oleh komunitas dan alam sekitarnya; kedua : segala aspek kehidupan manusia tergantung pada sesamanya, ketiga: mereka harus berusaha memelihara hubungan

baik dengan sesamanya dengan dilandasi dengan jiwa sama-rata sama-rasa; keempat: mereka selalu sedapat mungkin bersifat konform, bekerjasama dalam komunitas yang dijiwai oleh jiwa sama tinggi dan sama rendah.

Dari pandangan tersebut berarti apabila setiap orang dapat melaksanakan dan mengembangkan konsep kesetiakawanan maka rasa kesatuan dan persatuan akan semakin kokoh dan semangat kegotong royongan akan selalu tertanam dalam jiwa atau pribadi setiap orang.

Kehidupan seorang manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan sosial dimana mereka berada, baik lingkungan adat, agama dan budaya maupun lingkungan alam fisik. Keadaan inilah kemudian menimbulkan bahwa manusia akan selalu hidup dalam komunitas kelompoknya (*social group*). Kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga suatu kesadaran saling tolong menolong (Soekanto, 1982: 111).

Dalam kehidupan bersama dalam kelompok masyarakat (*social group*) akan terjadi saling berhubungan yang dalam istilah sosiologi disebut interaksi sosial. Gilin and Gillin dalam Triguna (1993: 38) dikemukakan bahwa interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Selain itu interaksi sosial juga merupakan hubungan sosial yang dinamis yang melibatkan hubungan orang perorangan, antara kelompok dengan kelompok maupun antara perorangan dengan kelompok. Proses interaksi sosial sering kali diawali dengan kontak dan komunikasi. Kontak baru akan berwujud komunikasi apabila pihak yang diajak kontak memiliki pemahaman yang sama terhadap apa yang disampaikan oleh pihak pertama. Interaksi sosial tidak selalu



berarti positif seperti adanya kerjasama, akan tetapi mungkin pula terjadi interaksi yang negatif, misalnya persaingan atau mungkin pertentangan.

Pelaksanaan upacara perkawinan *pamelin luh di Desa Pakraman Bebetin*, fungsi sosial tersebut sangat tampak dengan jelas sejak awal dari adanya rencana perkawinan. Dalam perkawinan yang dilakukan dengan *memadik* (*ngidih*, meminang), maka adanya kontak dan komunikasi telah dilakukan pada saat pihak keluarga laki menyampaikan maksud kedatangannya akan meminang anak gadis dari pihak perempuan. Interaksi sosial antara pihak keluarga laki dengan pihak keluarga perempuan telah terjadi saat dilakukan *pekrunaan* (*mekruna*). Apabila telah ada kepastian dan kesepakatan tentang hari baik dalam pelaksanaan upacara perkawinan maka dalam kaitan ini lebih tampak lagi adanya rasa kebersamaan dalam kehidupan sosial berupa gotong royong dalam *banjar pakraman* atau masyarakat Bebetin. Rasa soliraditas masyarakat Desa Bebetin cukup tinggi. Hal ini tampak bila ada warga masyarakat (*banjar*) yang akan melaksanakan suatu upacara atau *yajña* baik dalam keadaan suka maupun duka tanpa diundang asal didengarnya pasti datang dan ikut membantu baik berupa materi maupun berupa tenaga.

Masyarakat Desa atau Banjar Bebetin pada setiap ada *yajña* oleh warga banjar, khususnya oleh kaum ibu-ibu atau perempuan mulai ikut membantu dalam *mejejahitan*, membuat jajan untuk upacara dan upakara. Dari kelompok anggota masyarakat laki-laki dan kelompok *teruna terini* ikut membantu dalam mempersiapkan untuk tempat akan dilangsungkannya upacara.

Fungsi sosial kemasyarakatan dalam upacara perkawinan *pamelin luh* ini juga tampak bukan hanya dinilai sebagai sebuah tradisi, tetapi juga bagaimana warga banjar laki-laki pada pagi-pagi sekali menjelang puncak acara, warga datang dengan tanpa

diundang ikut membantu secara bergotong royong “*ngelawar atau metektekan*”, sehingga sekitar jam 07.00 waktu setempat sudah selesai *ngelawar*. Apabila telah selesai *ngelawar/metektekan*, maka semua yang ikut *ngelawar* disediakan makan pagi yang disebut “*penyemeng*”, setelah itu baru anggota masyarakat/banjar bisa pulang.

Dari fakta di atas ternyata fungsi sosial kemasyarakatan dalam upacara perkawinan *pamelin luh* sangat memberikan nilai positif dalam mewujudkan nilai kebersamaan dengan semangat kegotong royongan dari *krama desa Bebetin*, dalam melaksanakan *dharma agama*.

Dengan adanya upacara *pamelin luh* dalam perkawinan yang secara langsung juga dapat ditonton oleh warga masyarakat, akan tetapi walaupun demikian tidak menghilangkan atau mengurangi kesakralan dari ritual yang sedang dilaksanakan. Begitupun pula dengan adanya upacara perkawinan *pamelin luh* adalah merupakan contoh nyata dari adanya saling keterkaitan antara upacara dan religi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang hidup secara *menyama braya* menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang berlaku di suatu wilayah, yakni bersifat berkelanjutan dan adanya unsur persatuan oleh suatu rasa identitas untuk melakukan berbagai kegiatan aktivitas. Aktivitas itu dilakukan bersama sama dengan, manusia lainnya untuk mencapai cita-cita individual dan sosial (Koentjaraningrat, 1990: 146). Interaksi sosial dalam upacara perkawinan di *desa Pakraman Bebetin* sampai saat ini cukup kondusif. Hal ini tampak jika salah seorang dari warga masyarakat melangsungkan upacara perkawinan. Anggota masyarakat yang lainnya ikut bergotong royong membantu dalam proses pelaksanaan upacara tersebut. Bantuan yang diberikan bukan saja bantuan moral/spiritual tetapi juga bantuan materiil, misalnya dalam wujud alat/perlengkapan upacara, *jejaitan*, sumbangan jajan atau dalam bentuk material lainnya yang



sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan upacara perkawinan. Bantuan yang diberikan oleh warga atau *krama desa* lainnya adalah dilandasi oleh rasa keiklasan, toleransi dan rasa kebersamaan dengan berlandaskan pada konsep *menyama braya*, yaitu adanya rasa kedekatan antara anggota masyarakat, adanya rasa kepedulian sosial antara satu dengan yang lainnya tanpa pamerih dan segala permasalahan diselesaikan dengan musyawarah.

Konsep *menyama-braya* adalah merupakan kearifan lokal yang oleh *krama* Desa Bebetin tetap diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat apabila salah seorang warga/*krama* mempunyai suatu upacara, baik dalam upacara *dewa yajña*, *pitra yajña* ataupun *manusa yajña*, sehingga kehidupan sosial masyarakat selalu kondusif. Konsep inilah yang sangat menentukan pembentukan karakter anak yang sangat dipengaruhi oleh unsur *menyama-braya* atau konsep saling membantu dalam kehidupan keluarga.

III. SIMPULAN

Keberadaan keluarga sangat mempengaruhi keberadaan pendidikan anak, anak yang memiliki karakter yang baik tentunya dipengaruhi oleh keberadaan kedua orang tuanya, kondisi keluarga dan orang tuanya sangat berperan dan diawali dari keberadaan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, dan tentunya perkawinan tersebut tentunya diawali dengan melaksanakan upacara perkawinan, salah satunya tradisi perkawinan yang dilakukan adalah *pamelin luh*.

Pamelin luh dalam upacara perkawinan di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yaitu mengandung makna teologis, yaitu adanya keyakinan dari seluruh *krama* desa Bebetin akan kekuatan dari *Ida Betara Sesusunan* yang bersetana di *Pura Dalem*, yang diyakini akan membawa keselamatan dan kesejahteraan

bagi seluruh *krama desa* apabila tetap melestarikan dan mempertahankan tradisi leluhur. Bermakna simbolik karena dalam *pamelin luh* itu terdiri dari sarana buah pinang, kapur dan sirih adalah sebagai simbol pemujaan terhadap *Ida Sang Hyang Widhi*/Tuhan Yang Maha Esa. Bermakna untuk menjaga keseimbangan kosmis dan sosial dari keluarga mempelai perempuan. Makna lain dari perkawinan dengan *pamelin luh* adalah mengandung makna etika, karena dalam upacara *ngeraos ngidih* dan penyerahan *pamelin luh* dilakukan dengan penuh etika, masing-masing pihak akan berusaha bersikap dan berbicara sesuai dengan etika dan tata bahasa Bali *alus*. Dengan mempertahankan tradisi perkawinan *pamelin luh* diharapkan keluarga memiliki karakter yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthayasa. 2004. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Surabaya: Paramita
- Atmaja, I Dewa Gede. 1998. "Pembentukan dan Penegakan Hukum Adat" (dalam Majalah Kertha Patrika. Fak. Hukum Unud No.68 Tahun XXI Februari 1998).
- Awig-Awig Desa Pakraman Bebetin. Koentjaraningrat. 1994. *Pengantar Antropologi II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pudja, G. 2005. *Bhagawadgita (Pancana Wed)*. Jakarta: Maya Sari.
- Punyatmadja, Ida Bagus Oka. 1992. *Dharmasastra*. Jakarta: Proyek Sarana Keagamaan Hindu.
- PHDI Badung. 1986. Sahnya perkawinan menurut Hindu.
- Punyatmadja, Ida Bagus Oka. 1984. *Panca Sradha*. Jakarta: Yayasan Dharma Santhi.
- Sudharta. Tjokorda Rai. Dkk. 2003. *Arti Dan Fungsi Sarana Upakara di Bali*. Denpasar: Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.



-
- Ritzer, George dan Douglas J. Goddman.
2005. *Teori Sosiologi Modern*.
Jakarta: PT Kencana.
- Sandersen, Stephan K. 2004. *Sosiologi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sedana, I Made. 1994. "Babad Tanah Leluhur Desa Bebetin" (tanpa penerbit dan tempat terbit).
- UU No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia.
- UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.